

ABSTRAK

Ide perubahan Pasal 33 UUD 1945 muncul dengan euforia untuk mengubah keseluruhan substansinya yang dianggap menjadi sumber krisis ekonomi tahun 1997. Di saat yang bersamaan, terdapat anggapan bahwa perubahan Pasal 33 UUD 1945 cenderung reaksioner dan gagal melihat bahwa fakta bahwa krisis ekonomi terjadi diakibatkan politik ekonomi neo-liberal yang berlangsung pada masa Orde Baru. Perubahan ini berusaha merombak substansi yang jauh berbeda dengan rumusan aslinya, padahal sebuah amandemen idealnya berwujud penyesuaian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan konstitusi. Perubahan Pasal 33 UUD 1945 menghasilkan dua ayat baru yang memuat beberapa prinsip perekonomian baru. Prinsip-prinsip baru ini dinilai bertentangan dengan spirit asli di dalam Pasal 33. Pertentangan ini akhirnya sering kali menimbulkan kerancuan dalam pemaknaan dan implementasi Pasal 33 UUD 1945. Kondisi ketika terdapat upaya sadar untuk menghilangkan nilai esensial dari sebuah konstitusi yang telah dirumuskan sebelumnya tanpa memutus kontinuitas hukumnya disebut sebagai “*constitutional dismemberment*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian perubahan Pasal 33 UUD 1945 dengan nilai esensial di dalam Pasal 33 UUD 1945 berdasarkan doktrin *constitutional dismemberment*. Oleh karena itu untuk menengok dinamika yang terjadi pada undang-undang yang beririsan dengan Pasal 33 UUD 1945, praktik Pengujian Undang-Undang di MK dapat menjadi sebuah indikator untuk menemukan pengaruh perubahan Pasal 33 UUD 1945 terhadap penafsiran Pasal 33 UUD 1945 pasca amandemen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama. Data tersebut kemudian diulas secara deskriptif dengan analisis yang bersifat kualitatif. Identifikasi masalah pertama yang akan menganalisis perubahan Pasal 33 dalam kacamata doktrin *constitutional dismemberment* dengan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan historis. Identifikasi masalah kedua yang berkaitan dengan praktik penafsiran Pasal 33 UUD 1945 oleh MK menggunakan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi merupakan nilai esensial yang dimuat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mencerminkan aspirasi kolektif bangsa Indonesia dan membedakan sistem perekonomian Indonesia dari sistem perekonomian lainnya. Perubahan UUD 1945 telah mengganti identitas Pasal 33 UUD 1945 melalui amandemen formal tanpa merusak kontinuitas UUD 1945. Sehingga perubahan ini dapat dikategorikan *constitutional dismemberment*. Selanjutnya, berdasarkan analisis terhadap beberapa putusan MK, Penulis menyimpulkan bahwa meski terdapat beberapa inkonsistensi penafsiran, namun MK cenderung menguatkan kembali *original intent* pembentukan Pasal 33 dan mengembalikan nilai esensial Pasal 33 UUD 1945.

ABSTRACT

The idea of amending Article 33 of the 1945 Constitution emerged with euphoria to change its entire substance, which was considered the source of the 1997 economic crisis. On the other hand, there was an assumption that amendment to Article 33 of the 1945 Constitution tended to be reactionary and failed to see that the economic crisis occurred due to the neo-liberal economic politics that took place during the New Order era. This amendment seeks to overhaul a substance far from the original formulation, whereas an amendment should ideally be in the form of adjustments to achieve the Constitution's goals. Amendment to Article 33 of the 1945 Constitution resulted in two new paragraphs containing several new economic principles considered to be contrary to the original spirit of Article 33, so it often led to confusion in the meaning and implementation of Article 33 of the 1945 Constitution. When there is a conscious effort to eliminate the essential value of a previously formulated constitution without breaking its legal continuity, it is referred to as "constitutional dismemberment". This study aims to identify the suitability of the amendments to Article 33 of the 1945 Constitution with the essential values in Article 33 of the 1945 Constitution based on the doctrine of constitutional dismemberment. Therefore, to look at the dynamics that occur in laws that intersect with Article 33 of the 1945 Constitution, the practice of judicial review in the Constitutional Court can be an indicator to find the effect of changes to Article 33 of the 1945 Constitution on the interpretation of Article 33 of the 1945 Constitution after the amendment.

This study uses a normative juridical approach with secondary data as the main data. The data is then reviewed descriptively with a qualitative analysis. Identification of the first problem that will analyse changes to Article 33 from the perspective of the doctrine of constitutional dismemberment with 2 (two) approaches, namely the statutory and historical approaches. Meanwhile, identifying the second problem related to the practice of interpreting Article 33 of the 1945 Constitution by the Constitutional Court uses a case approach.

The results of the study show that the principles of kinship and economic democracy are essential values contained in Article 33 of the 1945 Constitution, which reflects the collective aspirations of the Indonesian people and differentiates the Indonesian economic system from other economic systems. Amendments to the 1945 Constitution have replaced the identity of Article 33 of the 1945 Constitution through formal amendments without destroying the continuity of the Constitution itself. So this change can be categorised as constitutional dismemberment. Furthermore, based on an analysis of several decisions of the Constitutional Court, the author concludes that although there are several inconsistencies in interpretation, the Constitutional Court tends to reaffirm the original intent of establishing Article 33 and restore the essential value of Article 33 of the 1945 Constitution.

